

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap upah tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan industrial. Upah merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap upah tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap upah tenaga kerja di PT Griya Kencana Lestari (GKL) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber pekerja dan pimpinan yang ada di PT Griya Kencana Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap upah tenaga kerja di PT Griya Kencana Lestari belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa pelanggaran dalam pembayaran upah, seperti pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan standar upah minimum Provinsi Jambi. Kendala dalam pelaksanaan hak-hak pekerja di PT Griya Kencana Lestari antara lain adalah kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja akan pentingnya perlindungan hukum terhadap upah tenaga kerja, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Upah Tenaga Kerja

ABSTRACT

Legal protection of labor wages is an important aspect of industrial relations. Wages are a worker's right that must be fulfilled by employers. However, in practice, legal protection for labor wages has not fully worked as it should. This research aims to determine and analyze legal protection for labor wages at PT Griya Kencana Lestari based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This research uses empirical juridical research methods, with research data obtained through literature study and in-depth interviews with resource persons, workers and leaders at PT Griya Kencana Lestari. The research results show that legal protection for labor wages at PT Griya Kencana Lestari is not fully in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This can be seen from several violations in wage payments, such as wage payments that do not comply with regulations, and wage payments that do not comply with the Jambi Province minimum wage standards. Obstacles in implementing workers' rights at PT Griya Kencana Lestari include a lack of awareness among employers and workers of the importance of legal protection for workers' wages, as well as weak government supervision.

Keywords: *Legal Protection, Labor Wages*